



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 10 Desember 2016

Korupsi ADD Oma Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015-2016 ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat telah mengeluarkan sprindik untuk dilakukan proses penyidikan. "Sprindik telah dikeluarkan sejak pekan lalu dan kasus ini resmi ditingkatkan ke penyidikan," kata Robert Ilat, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Jumat (9/12).

Dikatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Maluku. Namun ada temuan jaksa terhadap dugaan kerugian negara dalam kasus ini. "Kita telah berproses di tingkat penyidikan sambil menunggu hasil audit dari BPKP," ujar Ilat.

Kejari Ambon meminta BPKP Perwakilan Maluku melakukan audit agar dapat diketahui berapa besar kerugian negara dari ADD sebesar Rp 700 juta yang diperuntukan bagi Negeri Oma.

Tuding Sodorkan Laporan Fiktif

Tokoh Masyarakat Negeri Oma, Johannes Pattinama menuding pemerintah negeri setempat menyodorkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun 2015-2016 fiktif kepada penyidik Kejari Ambon.

Pattinama merincikan dugaan laporan fiktif tersebut, yakni di bulan Oktober 2015 memberikan bantuan untuk kelompok nelayan Rp 15 juta, bantuan bagi dua kelompok jibu-jibu Rp 14 juta, belanja alat-alat bengkel pemuda Rp 21 juta, belanja semen 120 sak Rp 8.400.000, belanja besi 15 staf Rp 1.200.000, dan kegiatan posyandu Rp 4 juta. Kemudian di bulan Desember 2015, dibuat juga laporan yang sama untuk item-item yang sudah dibayarkan itu.

"Jadi ada double pembayaran yang ditulis dalam laporan pertanggung jawaban kas umum Pemerintah Negeri Oma dan laporan tersebutlah yang telah disodorkan ke jaksa," ujar Pattinama, saat mendatangi Kantor Redaksi *Siwalima*, Selasa (14/9).

Selain itu, kata Pattinama, ada kuitansi belanja pada sejumlah toko maupun penerima bantuan yang fiktif.

"Kita sudah melakukan cross check ke sejumlah toko dan ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan data yang dilaporkan, misalnya pembelian semen maupun material lainnya," ungkapny.

Tetapi Raja Negeri Oma, Joseph Pattinama tak gentar. Ia mengklaim ADD tahun 2015-2016 telah direalisasikan 100 persen untuk pekerjaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. "Tidak ada masalah dengan ADD di Negeri Oma, anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab itu seluruhnya telah terealisasi 100 persen untuk pekerjaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat," tandas Joseph Pattinama, kepada *Siwalima*, di Ambon, Sabtu (3/9).

Pattinama mengaku, laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tersebut telah disampaikan ke Pemkab Malteng, bahkan sudah diaudit oleh BPK.

"Kita sudah diaudit oleh BPK berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang kita sampaikan ke Pemkab," ujarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Menurutnya, laporan yang disampaikan ke kejaksaan hanya asal-asalan, tanpa bukti. “Itu laporan yang omong kosong, laporan itu tidak benar karena anggarannya sudah disalurkan untuk pekerjaan infrastruktur desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Pattinama.

Pattinama menuding ada yang memprovokasi masyarakat di Negeri Oma terkait penggunaan ADD maupun Raskin.

“Ini ada pihak ketiga yakni masyarakat di luar Megeri Oma yang memanas-manaskan kondisi masyarakat di Negeri Oma untuk melaporkan masalah ini ke polisi maupun jaksa,” ujarnya.

Pattinama mendukung proses hukum yang sementara berjalan. “Kalau saya dipanggil untuk diperiksa, saya siap menghadiri panggilan nantinya,” tandasnya. **(S-16)**